

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **SISTEM CICILAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH**

**NISRIN AFRINASTI**

**NIM: 11722202789**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H/ 2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**


Skripsi ini berjudul *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Yang Dicicil Pada Permata Tenda Di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru."*

Nama : Nisrin Afrinasti  
NIM : 11722202789  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021

Pembimbing Skripsi

  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
**NIP.196507041994021001**

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh :

Nama : Nisrin Afrinasti  
 NIM : 11722202789  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 08 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2021

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**

.....

Sekretaris  
**H. Syamsuddin Muir, Lc, MA.**

.....

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.**

.....

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag.**

.....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

## ABSTRAK

### **Nisrin Afrinasti, (2021): Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah**

Penelitian ini berjudul “Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan pada Permata Tenda dimana upah pekerja yang dibayar dengan dicicil yang menjadi permasalahan pada usaha tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 2) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem cicilan pembayaran upah pekerja tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .

Penelitian ini dilakukan penulis melalui analisis Deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 11 orang yaitu 1 orang pemilik usaha sewa tenda dan 10 orang pekerja tenda tersebut sehingga penulis menggunakan teknik *total sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kemudian dianalisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdapat masalah karena terjadi kendala pada pembayaran upah dan para pekerja merasa dirugikan atas keterlambatan tersebut. Dimana pembayaran upah dibayar dengan dicicil tanpa adanya kesepakatan diawal akad dengan alasan si pemilik usaha tenda takut jikalau para pekerjanya berhenti tiba-tiba ketika orderan sewa tenda sedang banyak. Pemberlakuan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja tenda juga tidak diberitahukan oleh pemilik Permata Tenda karena ia mengkhawatirkan para pekerja tenda tidak menyetujui sistem tersebut. Menurut tinjauan Fiqih Muamalah pemberlakuan upah yang dicicil tersebut tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam karena dalam Islam upah para pekerja yang sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada kesepakatan antara pemilik usaha dengan para pekerjanya di awal akad.

Kata Kunci: *Fiqih Muamalah, Upah Pekerja, Tenayan Raya .*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarokatu*

Segala puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah.”** Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Khairunas dan Ibunda Sarteti, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang dan mengorbankan jiwa raga untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kepada kedua adek penulis, Elsa Khairunnisa dan Rifcy Haikal, serta seluruh keluarga besar tercinta.
3. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Dosen Penasehat Akademik beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus pembimbing penulis yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
8. Arhamizi Hamid selaku pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
9. Sahabat-sahabat yaitu Hafnayati, Asmita Nauli, Atikah Yuni, Sarnisah Hakim, Nurkalila, Dwi Purwanti Mesas, Sri Rafida dan Hanifa Rumaiza.
10. Sahabat-sahabat di Kost Putri Dewi 2 yaitu Muliyawati, Putri Widia Lestari, Khairun Natasya, Yopi Febriani, Kintan Juwita dan Rini Fitriani.
11. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, Maret 2021  
Penulis,

**NISRIN AFRINASTI**  
**NIM: 11722202789**



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kulim .....	16
B. Letak Geografi Kelurahan Kulim.....	19
C. Data Demografi Kelurahan Kulim.....	19
D. Sosial Ekonomi Kelurahan Kulim.....	21
E. Sejarah Berdirinya Permata Tenda.....	22
F. Nama-Nama dan Umur Para Pekerja Tenda .....	23
G. Produk-Produk Yang Disewakan Permata Tenda.....	24
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DAN CICILAN</b>	
A. Tenaga Kerja .....	29
B. Akad .....	34
C. Ijarah dan Upah .....	37
D. Cicilan atau Kredit .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Pada Permata Tenda Di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .....	73



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Cicilan Pembayaran Upah Pekerja Pada Permata Tenda Di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .....	81
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .....	20
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Kelurahan Kulim Menurut Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .....	20
Tabel 2.4.	Agama Yang Dianut Masyarakat Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .....	21
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .....	22



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah muamalah.<sup>1</sup> Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi, secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta.<sup>2</sup>

Ruang lingkup didalam bermuamalah seperti jual beli (*al-ba'i wa al-ijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *daman*), perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudarabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqatah*), garapan tanah (*al-muzaro'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhobaroh*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*syuf'ah*),

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 2.

<sup>2</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masalah kontemporer (*al-mu'asiroh*) seperti masalah bunga bank, asuransi dan kredit.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu kegiatan produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-'amal* yaitu sewa menyewa tenaga manusia.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak mengalami rugi. Kebolehan transaksi sewa menyewa didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah At-Talaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” (QS. At-Talaq [65]: 6)

*Ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan bermuamalah, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya.<sup>4</sup> Dalam praktiknya selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan

<sup>3</sup> Qomural Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h, 2-7.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

imbangan tertentu, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirikannya.

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijarah*. Oleh karena itu, lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>5</sup> Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk diantaranya manfaat benda, manfaat pekerjaan dan manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'jir*. Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur* dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.<sup>6</sup>

Pengertian *ijarah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fikih Islam sebagai berikut:

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafii *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Maksudnya ialah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), h. 29.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui.<sup>7</sup>

3. Menurut ulama Maliki *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>8</sup>

Jadi dalam syariah Islam jika seorang pekeja atau buruh mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun akhirat (berupa pahala). Dapat kita pahami bahwa upah yang disebut *al-ajru* atau ujah menurut syariah tidak hanya memiliki aspek dunia saja yaitu berupa upah atas hasil kerjanya, namun memiliki aspek ketuhanan (akhirat) berupa imbalan pahala.

Pemberian upah itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang bersisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah dengan prinsip semestinya lebih terwujud.

Sebagaimana didalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Upah yang harus diberikan hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat sehingga kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Pada masa khalifah Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>10</sup>

Secara umum, pemberian upah dilakukan seketika pekerjaan itu selesai. Tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh membicarakan dan diputuskan untuk mendahulukan pembayaran upah atau pembayaran upah di akhir. Jadi pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian pada saat akan melaksanakan akad upah mengupah. Karyawan atau buruh hendaknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian, baik perjanjian itu tertulis maupun perjanjian lisan. Majikan wajib pula memberikan upah sebagaimana yang telah ditentukan sebelum waktu yang ditentukan pula.<sup>11</sup>

Pada kasus yang terjadi di masyarakat sering terdapat kesenjangan yang tidak sesuai dengan teori yang telah dipelajari. Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat adalah pemberian upah yang dicicil sehingga menimbulkan berbagai persoalan diantara kedua belah pihak.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja. Hal tersebut

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 283.

<sup>11</sup> M Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari profesionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.<sup>12</sup>

Pada teori seperti yang dipaparkan di atas maka penulis merasa kasus yang terjadi pada usaha tenda di Permata Tenda didaerah Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menarik untuk diteliti. Pada usaha tersebut terjadi permasalahan tentang upah pekerja yang dibayar dengan cicilan tanpa adanya perjanjian di awal akad antara pemilik usaha dengan pekerja tenda.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Permata Tenda mengatakan bahwa: “Saya menawarkan kerja kepada mereka (pekerja tenda) tanpa memberitahukan sistem yang saya pakai pada pemberian upah mereka, saya hanya memberitahu jika saya yang akan menanggung biaya makan mereka selama bekerja dan membayar upah mereka ketika sewaan per proyek selesai satu persatu karena saya takut mereka tidak menyetujui sistem yang saya terapkan.”<sup>14</sup>

Kemudian Regi Mai Putra selaku pekerja pada Permata Tenda juga mengatakan hal yang sama:”Ketika pak Arhamizi Hamid menawarkan kerja kepada saya ia tidak menjelaskan sistem pembayaran upah kepada saya, ia

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>13</sup> Diano Gustiadi, *Wawancara*, (Kulim: Pekerja Tenda Pada Permata Tenda), 21 September 2020 Pukul 10:00.

<sup>14</sup> Arhamizi Hamid, *Wawancara*, Pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya mengatakan bahwa ia menanggung biaya makan dan membayar upah kerja saya ketika sewaan per proyek selesai satu persatu.”<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadi pelebaran atau perluasan masalah dalam tulisan yang diangkat, sehingga peneliti memfokuskan untuk meneliti tentang Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian pada skripsi ini dilakukan penulis pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 15 Februari 2021.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

---

<sup>15</sup> Regi Mai Putra, *Wawancara*, Pekerja Pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan sistem cicilan pembayaran upah pekerja Pada Permata tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan sistem cicilan pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Melatih berfikir kreatif, inovatif dan jeli dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari.
- c. Berguna bagi masyarakat dan pemilik usaha khususnya pemilik usaha sewa tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau agar lebih memahami tentang perspektif Fiqih Muamalah terhadap pembayaran upah kerja.



- d. Bermanfaat bagi kalangan pendidikan dan akademisi untuk menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) oleh karena itu peneliti memilih Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja tenda yang menjalankan usaha sewa tenda tersebut, adapun objeknya yaitu sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang ditinjau menurut perspektif Fiqih Muamalah.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek penelitian yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka ditemukan populasi sebanyak 11 orang yaitu 1 orang pemilik usaha sewa tenda dan 10 orang pekerja tenda tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>16</sup> Karena jumlah populasi yang sedikit yaitu 11 orang, maka semua populasi dijadikan sampel dengan teknik *total sampling*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>17</sup> Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik usaha sewa tenda dan pekerja tenda pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>18</sup> Sumber data sekunder ini melalui sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku kepustakaan, dokumentasi maupun

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 43.

<sup>17</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan-catatan serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan sebagai penunjang dari data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dari Kamus, Internet, Jurnal, Ensiklopedia dan lainnya yang menunjang penelitian.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Teoritik

Hal-hal yang bersifat teoritik yang ada relevansinya dengan penelitian tentang sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru melalui tinjauan Fiqih Muamalah dan melalui pengkajian buku-buku, literatur, internet dan lain-lain.

2) Sumber Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi yang ada dilokasi penelitian dalam hal ini pemilik usaha sewa tenda dan pekerja tenda.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung, serta memperhatikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data secara langsung dengan teknik observasi pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk mendapatkan dan mengetahui bukti secara jelas hal yang menjadi fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan dengan suatu informan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.<sup>20</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai pembayaran upah dengan cicilan secara objektif dari masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para pekerja dan pemberi pekerjaan yang ada pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pada usaha sewa tenda tersebut terdapat 1 orang pemilik usaha dan 10 orang pekerja. Wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai pembayaran upah yang dicicil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), cet. ke-2 h. 76.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 83.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.<sup>21</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati.<sup>22</sup> Alasan peneliti untuk menggunakan teknik analisis data kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian.

#### 7. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara alami tanpa adanya suatu perlakuan tertentu yang direncanakan.

<sup>21</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 391.

<sup>22</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 71.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu menganalisa data yang telah ada dan menyimpulkannya dengan mencari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menggambarkan sejarah berdirinya Kelurahan Kulim, letak geografis Kelurahan Kulim, data demografis Kelurahan Kulim, sosial ekonomi Kelurahan Kulim, sejarah berdirinya Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, daftar nama dan profil para pekerja tenda, produk-produk yang disewakan pada Permata Tenda di Kulim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru serta rincian harga sewa pada setiap produk sewaan pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DAN CICILAN**

Mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang dibatasi pada pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah upah pekerja, teori pertama menyangkut tenaga kerja diantaranya pengertian tenaga kerja, prinsip ketenagakerjaan dalam Islam dan hubungan buruh dengan majikan. Teori kedua tentang *ijarah* dan upah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *ijarah*, pengertian upah, pengupahan dalam pandangan hukum Islam, rukun upah, syarat upah, sistem pengupahan, prinsip-prinsip upah dalam ajaran Islam serta berakhirnya upah. Pada teori yang ketiga tentang cicilan yang berisikan pengertian cicilan, sejarah munculnya cicilan, unsur-unsur cicilan, fungsi cicilan, jenis-jenis cicilan serta kelebihan dan kekurangan cicilan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas secara terperinci pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem cicilan pembayaran upah pekerja pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan oleh penulis kepada pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kulim

Pada tahun 1976 Kelurahan Kulim adalah wilayah kewalian yang merupakan bagian dari wilayah Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama M. Isa Nur. Kelurahan Kulim adalah wilayah yang disebut Wali Muda Kulim Atas dan Kelurahan Rejosari disebut Kewalian Muda Rejosari dimana Desa Sail merupakan desa induk.

Selanjutnya pada tahun 1985/ 1986 dua wilayah kewalian tersebut menjadi desa definitif (sudah pasti) dengan nama Desa Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang merupakan pilihan langsung dari masyarakat yang bernama Sumarno Tohir sebagai kepala desa pertama dan Desa Rejosari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan para tokoh masyarakat Desa Kulim sekitaran tahun 1985/ 1986, pemberian nama Kulim pada desa tersebut karena pada wilayah desa itu terdapat jenis kayu yang sangat keras dan bagus untuk bahan bangunan yang dinamakan dengan kayu *kulim*, sehingga nama Desa Kulim diambil dari nama kayu tersebut. Kemudian pada tahun 1987/ 1988 Desa Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi bagian dari wilayah

<sup>23</sup> Bismi Hayati, *Lurah*, Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Wawancara 22 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Bukit Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. Kepala desanya adalah Drs. M. Yakub yang juga dipilih langsung oleh masyarakat.

Pada tahun 1997 Desa Kulim dan desa-desa lain di wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru yang terdiri dari Desa Sail, Desa Rejosari, Dasa Kulim, Desa Tebing Tinggi Okura, Desa Tampan, Desa Labuh Baru, Desa Simpang Baru dan satu desa khusus yaitu Desa Dirgantara (daerah Lanud Simpang Tiga) yang kemudian berubah statusnya menjadi kelurahan.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru menyebabkan peningkatan kegiatan pelayanan kependudukan pada semua bidang yang harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk memenuhi tuntutan tersebut serta untuk lebih dekatnya jenjang birokrasi di Kota Pekanbaru, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 dan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir.<sup>24</sup>

Kecamatan Tenayan Raya memiliki empat kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Sail
2. Kelurahan Rejosari
3. Kelurahan Kulim
4. Kelurahan Tangkerang

---

<sup>24</sup> Ibid.

Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pemekaran kelurahan dalam Kota Pekanbaru sehingga Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya dimekarkan menjadi empat kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kulim
- b. Kelurahan Mentangor
- c. Kelurahan Sialang Rampai
- d. Kelurahan Pebatuan<sup>25</sup>

Kelurahan Kulim memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan maksud dan tujuannya yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Kelurahan Kulim sebagai tempat pemukiman yang BERSATU (Bersih, Elok, Rindang, Sehat, Aman, Tertib dan Usaha Bersama) dan sebagai pusat perdagangan dan jasa menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Memberdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kelurahan Kulim.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif.
- d. Menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim perekonomian yang kondusif dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan.

---

<sup>25</sup> Ibid.

- e. Terwujudnya lingkungan yang BERSATU (Bersih, Elok, Rindang, Sehat, Aman, Tertib dan Usaha Bersama).<sup>26</sup>

## **B. Letak Geografis Kelurahan Kulim**

Secara geografis Kelurahan Kulim memiliki ketinggian wilayah 6 Meter diatas permukaan laut dan luas wilayah Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya lebih kurang 500 Hektar yang terdiri dari 58 RT dan 18 RW dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Bukit Rahayu Kelurahan Tengkreng Timur.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Timur Kelurahan Sialang Rampai.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sepakat Kelurahan Pebatuan dan Kelurahan Pematang Kapau.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Binjai Raya Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya.

## **C. Data Demografis Kelurahan Kulim**

### **1. Keadaan Sosial Penduduk**

Kelurahan Kulim mempunyai jumlah penduduk sebanyak 12.650 jiwa dan terdiri dari 3.289 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 18 Rukun Warga (RW) dan 59 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

No	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Jumlah RW
		Laki-laki	Perempuan			
1	3.289	6.389	6.171	12.560	59	18

Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam masyarakat karena pendidikan dapat meningkatkan status sosial seseorang. Apabila pendidikan seseorang baik maka taraf hidupnya akan baik juga. Perkembangan zaman seperti sekarang ini yang semakin maju dan berkembang perlu adanya pendidikan agar masyarakat memiliki ilmu serta bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Jumlah penduduk Kelurahan Kulim menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Kulim Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Orang	Jumlah
1	Belum Sekolah	1.288	10810
2	Tamat SD	1.663	
3	Tamat SMP	2.021	
4	Tamat SMA	5.024	
5	Diploma I/II/III	678	
6	SI/SII	136	

Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

No	Sarana Pendidikan	Orang	Jumlah
1	TK	5	16
2	SD/MI	7	
3	SMP/MTS	3	
4	SLTA/SMK	1	
5	AKD/PT	-	

Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kehidupan Beragama

Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya.<sup>27</sup> Mayoritas masyarakat Kelurahan Kulim menganut agama Islam dan minoritas menganut agama lain seperti khatolik, protestan dan sebagainya.

**Tabel 2.4**  
**Agama Yang Dianut Masyarakat Kelurahan Kulim Kecamatan**  
**Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

No	Agama	Orang	Jumlah
1	Islam	11.948	12.560
2	Khatolik	300	
3	Protestan	261	
4	Hindu	-	
5	Budha	51	

Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya

### D. Sosial Ekonomi Kelurahan Kulim

Perekonomian masyarakat tidak terlepas dari mata pencaharian masyarakat itu sendiri. Mata pencaharian sendiri berarti aktivitas masyarakat untuk memperoleh taraf hidup layak, dimana mata pencaharian antara masyarakat pasti berbeda sesuai letak geografisnya. Sedangkan mata pencaharian penduduk adalah suatu pekerjaan yang dilakukan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sampingan.<sup>28</sup> Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Kulim ada bermacam-macam seperti data pada tabel dibawah ini:

<sup>27</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h. 2.

<sup>28</sup> *Ibid.*

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kelurahan Kulim**  
**Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

No	Jenis Mata Pencaharian	Orang
1	Pertanian	242
2	Perkebunan	548
3	Peternakan	216
4	Pedagang dan Jasa	1.202
5	Pengrajin dan Industri Kecil	587
6	Angkutan	259
7	PNS/TNI/POLRI	818
8	Buruh	1.793
9	Lain-lain	3.001
<b>Jumlah</b>		<b>8666</b>

*Sumber:* Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya

#### E. Sejarah Berdirinya Permata Tenda

Tenda acara merupakan salah satu unsur terpenting dalam dekorasi sebuah acara, dimana tenda tersebut berguna untuk melindungi para tamu dari sinar matahari bahkan hujan. Sewa tenda dekorasi adalah jasa penyewaan tenda plafon bahkan tenda semi dekorasi. Sehingga masyarakat yang berminat dapat menggunakan jasa rental tenda ini untuk acara-acara pernikahan, walimatul khitan, ulang tahun, tasmiyahan, seminar, dan acara lainnya yang membutuhkan tempat diluar ruangan (outdoor).

Tenda acara bukan saja hal penting dalam suatu dekorasi dari sebuah acara, tetapi kegunaan dari tenda tersebutlah yang membuat para penyelenggara wajib untuk menggunakan tenda dekorasi pada setiap acara yang mereka selenggarakan.

Permata Tenda merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang jasa tenda dekorasi, dengan sistem informasi penyewaan tenda dekorasi yang sedang berjalan saat ini. Permata Tenda berdiri semenjak 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Januari 2005 sampai sekarang. Usaha tenda tersebut berlokasi di Jalan Tarikat, RT 02/ RW 02, Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang dimiliki dan dikelola oleh Arhamizi Hamid.<sup>29</sup>

Permata Tenda sudah dikenal dan banyak disewa oleh kalangan masyarakat mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat yang ingin melaksanakan berbagai acara, misalnya pelaksanaan acara penukaran uang di Bank Indonesia Kota Pekanbaru. Usaha tenda ini sudah diketahui dan terkenal diberbagai kota di Indonesia khususnya di Provinsi Riau seperti Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Duri dan sebagainya.

Awal berdirinya Permata Tenda ialah dari usaha tenda kecil-kecilan yang hanya memiliki beberapa jenis ukuran tenda yang disewakan hingga sekarang sudah banyak dikenal dan disewa masyarakat. Bahkan sekarang Permata Tenda tidak hanya menyewakan tenda saja, melainkan juga menyewakan berbagai jenis kursi, meja, karpet dan panggung pelaminan yang digunakan untuk berbagai jenis acara serta menyediakan jasa pendekorasi tenda dan pelaminan.<sup>30</sup>

## F. Nama-Nama dan Umur Para Pekerja Tenda

Jumlah pekerja pada Permata Tenda ada sepuluh orang dengan usia yang berbeda-beda yaitu:

---

<sup>29</sup> Arhamizi Hamid, *Wawancara*, Pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.

<sup>30</sup> Arhamizi Hamid, *Wawancara*, Pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diano Gustiadi berumur 23 tahun.
2. Regi Mai Putra berumur 27 tahun.
3. Seto Pinastio berumur 20 tahun.
4. Aprial Syawal berumur 27 tahun.
5. Budi Santoso berumur 38 tahun.
6. Muhammad Irpan berumur 20 tahun.
7. Witra Slayer berumur 25 tahun.
8. Abdul Razak berumur 43 tahun.
9. Saprul Junaidi berumur 30 tahun.
10. Muhammad Fikri berumur 28 tahun.

#### G. Produk-Produk Yang Disewakan Permata Tenda

Produk bisa berupa barang maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Produk yang dimaksud di sini adalah perlengkapan untuk pesta, hajatan, dan acara formal maupun non formal lainnya. Produk yang ditawarkan pada Permata Tenda berupa barang seperti tenda, kursi, meja, dan sebagainya. Selain itu, produk berupa jasa juga disediakan pada usaha tenda ini misalnya pemasangan tenda, panggung pelaminan dan lain sebagainya.

Produk-produk yang disewakan pada usaha tenda ini terdiri dari berbagai jenis produk seperti kursi, meja, karpet dan panggung pelaminan bahkan usaha ini juga menyediakan jasa pendekorasi tenda dan pelaminan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai jenis harga pada setiap produk dan ukuran sesuai dengan pesanan dan selera konsumen.<sup>31</sup>

Berikut beberapa harga tenda sesuai besar kecil dan jenis produk pesta lainnya yang disediakan oleh Permata Tenda seperti kursi, meja, karpet dan panggung pelaminan dengan rincian harga yang berbeda yaitu:

#### 1. Tenda

Ketika mengadakan suatu acara atau pesta tentu pesta adalah properti yang seharusnya disediakan atau disewa. Tenda adalah pilihan properti atau perlengkapan pesta maupun acara lain yang menggunakan konsep *outdoor* (luar ruangan) dan berfungsi sebagai pelindung dari cuaca panas maupun hujan.

Harga tenda yang disewakan ditentukan berdasarkan ukuran dan banyaknya dekoran, semakin besar ukuran tenda dan banyak dekorannya maka akan semakin besar pula harganya. Berikut rincian harga masing-masing ukuran tenda:

- a. Tenda ukuran 2,5 X 2,5 = Rp. 300.000
- b. Tenda ukuran 3 X 4 = Rp. 400.000
- c. Tenda ukuran 4 X 4 = Rp. 500.000
- d. Tenda ukuran 4 X 6 = Rp. 700.000
- e. Tenda ukuran 6 X 6 = Rp. 850.000
- f. Tenda ukuran 6 X 8 = Rp. 950.000
- g. Tenda ukuran 8 X 8 = Rp. 1.200.000

<sup>31</sup> Aprial Syawal, *Wawancara*, Pekerja Pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kursi

Kursi yang disewakan pada Permata Tenda terdiri dari beragam jenis mulai dari kursi plastik, kursi futura, kursi rotan hingga kursi jati kualitas baik yakni kursi yang memiliki bahan yang tebal dan kuat serta dipakaikan sarung kursi pada kursi plastik agar terlihat bagus, menarik dan bersih. Sedangkan pada kursi futura, kursi rotan dan kursi jati diberi hiasan berupa kain yang diikatkan semenarik mungkin pada bagian belakang kursi tersebut agar terlihat lebih menarik dan mewah. Jumlah kursi di Permata Tenda ini pada setiap jenisnya pun berbeda yaitu:

- a. Kursi plastik = 300 Unit
- b. Kursi futura = 400 Unit
- c. Kursi rotan = 250 Unit
- d. Kursi jati = 75 Unit<sup>32</sup>

Berikut rincian jenis kursi beserta harganya:

- a. Kursi plastik = Rp. 5000/ Unit
- b. Kursi futura = Rp. 8000/ Unit
- c. Kursi rotan = Rp. 15.000/ Unit
- d. Kursi jati = Rp. 35.000/ Unit

3. Meja

Meja yang disewakan pada Permata Tenda terdiri dari beberapa jenis dan ukuran yang terbuat dari kayu berkualitas. Meja tersebut diberi taplak berupa kain dengan berbagai warna dan motif dekorasi pinggiran

---

<sup>32</sup> Regi Mai Putra, *Wawancara*, Pekerja Pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meja yang disesuaikan dengan dekorasi tenda pesta ataupun sesuai dengan permintaan konsumen. Meja yang disewakan terdiri dari jumlah yang berbeda yaitu:

- a. Meja 1 X 1,5 = 25 Unit
- b. Meja bulat = 24 Unit
- c. Meja 1 X 3 = 8 Unit

Meja yang disewakan pada usaha ini juga beragam harganya yang disesuaikan berdasarkan jenis dan ukuran meja serta sesuai dengan permintaan konsumen, mulai dari harga Rp.50.000 hingga Rp.100.000 per unit.

Harga meja yang disewakan dirincikan sebagai berikut:

- a. Meja 1 X 1,5 = Rp. 50.000/ Unit
- b. Meja bulat = Rp. 60.000/ Unit
- c. Meja 1 X 3 = Rp. 100.000/ Unit

4. Karpet

Karpet merupakan salah satu perlengkapan dalam sebuah acara yang berhubungan dengan pesta, hajatan, resepsi pernikahan, acara-acara formal dan acara lainnya. Karpet tersebut digunakan diberbagai macam ruangan seperti acara pesta di gedung, pesta taman dan sebagainya untuk memberikan kesan mewah pada ruangan ataupun suatu tempat penyelenggaraan acara formal maupun non formal. Karpet yang disewakan menggunakan bahan dan jenis yang berbeda. Jenis karpet di Permata Tenda ada dua jenis dengan ukuran yang berbeda pula yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Karpet rumput sepanjang 1500 meter.
- b. Karpet merah sepanjang 300 meter.

Harga sewa karpet di usaha tenda ini memiliki harga yang berbeda-beda pada tiap jenis karpet dan panjang permeternya yaitu:

- a. Karpet rumput = Rp. 12.000/ Meter
- b. Karpet merah = Rp. 9.000/ Meter<sup>33</sup>

5. Panggung pelaminan

Panggung pelaminan adalah panggung yang terletak dibagian paling depan kursi dan meja tamu untuk tempat pengantin duduk agar semua orang yang hadir bisa melihat pengantinnya dengan jelas. Panggung pelaminan pada usaha tenda ini juga memiliki ukuran yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda pula pada setiap ukurannya yaitu:

- a. Panggung pelaminan 3 X 4 = Rp. 200.000
- b. Panggung pelaminan 3 X 8 = Rp. 350.000
- c. Panggung pelaminan 4 X 6 = Rp. 400.000<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Diano Gustiadi, *Wawancara*, Pekerja Pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.

<sup>34</sup> Aprial Syawal, *Wawancara*, Pekerja Pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 15 Februari 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DAN CICILAN

#### A. Tenaga Kerja

##### 1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Imam Syaibani “kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggungjawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja seperti firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal Shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97

Al-Quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. Al-Balad (90) ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.” (QS. Al-Balad [90]: 4)

Kata *kabad*, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Setiap penaklukan manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja keras yang dijalani. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam

Empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam:

### a. Kemerdekaan manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

### b. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

### c. Prinsip keadilan

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 25:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS. Al-Hadid [57]: 25)

Adil yang dimaksud pada ayat di atas adalah penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan merongrong kepada yang kuat dan yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. Disamping itu, keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

d. Prinsip kejelasan aqad (perjanjian) dan transaksi upah

Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan antara pekerja dengan majikan yang meliputi etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu.<sup>36</sup>

### 3. Hubungan Buruh Dan Majikan

Hubungan buruh dengan majikan merupakan wujud hubungan muamalah yang diatur dalam syariah Islam. Dalam hal ini, baik seorang buruh maupun majikan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur Islam dalam bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil, jujur dan amanah. Nilai luhur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tauhid maknanya mengesakan Allah SWT, baik buruh maupun majikan haruslah sama-sama beriman kepada Allah SWT, mengesakan Allah SWT, sehingga dalam menjalankan pekerjaan atau usaha mereka semua memiliki niat mencari keridhoan Allah SWT semata.
- b. Baik buruh maupun majikan melaksanakan hubungan kerja dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan tidak akan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syara'.
- c. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara adil dengan mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-masing.

<sup>36</sup> Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Terjemah Soeroyo dkk*, (Yogyakarta: PT. Dana B'akti Wakaf, 1995), h. 248.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara terbuka dari awal menandatangani kontrak atau kesepakatan kerja hingga proses pelaksanaan kerja, masing-masing berlaku jujur dan terbuka.
- e. Keduanya sama-sama memegang amanah, melakukan pekerjaan atau usaha sebagai wujud menunaikan amanah Allah SWT dan masing-masing menunaikan amanah atau tanggung jawab yang disepakati.

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau pelayanan yang banyak diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.<sup>37</sup>

## B. Akad

### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad

Menurut segi etimologi akad bisa berarti sambungan dan janji.<sup>38</sup> Maka dari itu akad yaitu janji, janji yang harus dipenuhi seperti firman Allah SWT tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

<sup>37</sup> Viethzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Human Capital Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 69.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, h. 43.

## 2. Rukun Dan Syarat Akad

Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi hukum akad yang merupakan unsur akad. Rukun akad tersebut antara lain yaitu:

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>39</sup>
- b. *Shighat al-aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>40</sup>
- c. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.<sup>41</sup>
- d. Tujuan pokok akad, tujuan akad itu jelas dan diakui syara dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.
- e. Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat akad tersebut.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Mardani, *Op. Cit*, h. 72.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 47.

<sup>41</sup> Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Grenta Press, 2008), h. 8.

<sup>42</sup> Mardani, *Op. Cit*, h. 72-73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain rukun, syarat akad haruslah terpenuhi agar akad itu sah yang terbagi menjadi:

- a. Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua yaitu syarat umum dan syarat dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:
  - 1) Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada lima rukun akad yaitu, shighat, objek akad (ma'qud alaih), para pihak yang berakad (aqidain), tujuan pokok akad dan kesepakatan.
  - 2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan gubhn atau penyewaran.
  - 3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.
- b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (muftsid) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis menyebabkan pertengkaran (al-Jilalah), adanya paksaan (ikrah), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (taugif), terdapat unsur tipuan (gharar) dan terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (dharar).
- c. Syarat berlakunya (nafids) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

- d. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).<sup>43</sup>

### C. *Ijarah* dan Upah

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.<sup>44</sup> Menurut etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>45</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Didalam istilah hukum Islam

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>44</sup> Habib Nazir dan Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), h.4.

<sup>45</sup> Rachmad Syafei, *Op. Cit*, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang menyewakan disebut “*mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, benda yang disewakan diistilahkan “*ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut “ujrah”.<sup>46</sup>

Rasulullah bersabda bahwa:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>47</sup>

Implikasi dari Sunnah tersebut untuk masa sekarang adalah bahwa upah dibayarkan pengusaha kepada pekerja tepat pada waktunya. Upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi pekerja, maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut.<sup>48</sup>

Upah atau ujah adalah dalam hukum Islam ada dua jenis *ijarah* yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut ujah.

<sup>46</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 52.

<sup>47</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Pustaka Imam Adz Dzahabi: No. 941), h. 447.

<sup>48</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir atau mu'ajir dan biaya sewa disebut ujarah.

Terkait dengan pembagian *ijarah* tersebut, penyusun lebih memfokuskan pembahasan pada *ijarah al-'amal*. Hal ini dikarenakan ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan upah tenaga kerja.

Fikih Islam membagi *ajir* menjadi dua yaitu:

- a. *Ajir Khass* yaitu orang yang bekerja kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu secara khusus dan akan mendapatkan upah dengan penyerahan dirinya sesuai kesepakatan.
- b. *Ajir Musytarak* yaitu orang yang waktu pelaksanaan kerjanya tidak ditentukan dan akan mendapatkan upah dengan cara penyelesaian pekerjaannya tersebut.<sup>49</sup>

Sedangkan *ijarah al-'amal* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Ijarah khusus* yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

<sup>49</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, (Yogyakarta: Grafindo Utara Muda, 2007), h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Ijarah* musytarakah adalah *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik.<sup>50</sup>

## 2. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

### a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>51</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, *upah*, dan *manfaat*. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (Orang yang berakad), orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>52</sup>
- 2) *Shighat aqad*, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Rachmad Syafei, *Op. Cit*, h. 134.

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 230.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 117.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 205.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Ujroh* (upah), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya :

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
  - b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
  - c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>54</sup>
- 4) Manfaat, diantara cara untuk mengetahui *ma'qud* alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>55</sup>

#### b. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila

<sup>54</sup> Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178.

<sup>55</sup> Rachmad Syafei, *Op. Cit*, h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan kepada orang lain lagi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>56</sup>

### 3. Macam-Macam *Ijarah*

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>57</sup>

### 4. Pengertian Upah

Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia juga dihadapkan

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

<sup>57</sup> *Ibid.*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebutuhan jasa, disinilah terjadi keseimbangan. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain juga membutuhkan tenaga jasa mereka. Dalam Islam sewa menyewa jasa disebut *al-ijarah*. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>59</sup> Oleh karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah melakukan sesuatu kegiatan.<sup>60</sup> Sedangkan menurut syara’ *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>61</sup> Upah juga sering disebut dengan *ijarah ‘ala al-a’mal* ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.<sup>62</sup>

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian

<sup>58</sup> Ascarya, *Op. Cit*, h. 228.

<sup>59</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

<sup>60</sup> Helmi Karim, *Op. Cit*, h. 29.

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

<sup>62</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah dengan konsep *ijarah*. *Ijarah* adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijarah* berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya.

*Ijarah* mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan atau terjadi perselisihan didalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.<sup>63</sup>

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepadapara pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis yaitu, "Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan."<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Huda Nurul, *Op. Cit*, h. 227.

<sup>64</sup> Rahman Afzalur, *Op. Cit*, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pengupahan Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk kedalam *Ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.<sup>65</sup> Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang

---

<sup>65</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya:<sup>66</sup>

- a. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
  - 1) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
  - 2) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.
- b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.
  - 1) Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

<sup>66</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat.
- b) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak ada unsur paksaan.
- c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya karyawan yang bekerja ditempatnya, maka usaha yang dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun mendapatkan pangalaman kerja.
- d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>67</sup>

Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas muamalat oleh

Juhaya S. Praja, yaitu:

<sup>67</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Asas *tabadul al-manafi*, maksudnya adalah asas saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan bersama. Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan saling bermanfaat.
- 2) Asas pemerataan, maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Asas ini menyangkut tentang prinsip keadilan dalam bidang muamalat.
- 3) Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam transaksi muamalat maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dan lainnya. Dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja tidak ada unsur paksaan. Pengusaha tidak memaksa pekerja untuk bekerja di tempatnya dan pekerja tidak ada paksaan untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu.
- 4) Asas *'adam al-gharar*, maksudnya adalah setiap bentuk muamalat harus tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang pelaksanaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidaksukaan.

- 5) Asas *al-birr wa at-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai macamnya. Jadi, apabila suatu transaksi muamalat bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Semua bentuk muamalat baik dalam bentuk saling suka sama suka atau dalam bentuk kerja sama lain sekalipun diadakan dengan cara saling menguntungkan tetapi tidak dalam rangka *al-birr wa taqwa* maka terlarang. Dalam hal ini, pengusaha dan karyawan mempunyai hubungan kerja yang baik.
- 6) Asas musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. Semua bentuk kerja sama itu harus melibatkan semua pihak secara luas yang harus ikut merasakan kemanfaatannya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Rukun Upah

- a. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.
- b. *Shighat* adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan pekerja. Dalam *shighat* ada *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'ajjir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'ajjir*.
- c. *Ujrah* (upah) adalah dasar yang digunakan untuk penetapan upah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan.
- d. *Ma'uqud alaihi* (barang yang menjadi objek). Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Qomarul Huda, *Op. Cit*, h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Syarat Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (upah) sebagai berikut:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat mewujudkan rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum didalam diri setiap individu pelaku ekonomi.<sup>70</sup>
- b. Upah yang berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur fuqaha selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- c. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

<sup>70</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>71</sup>
- e. Berupa harta tetap yang diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
  - 1) Penjelasan tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.<sup>72</sup>
  - 2) Penjelasan waktu, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Didalam buku karangan Wahhab Zuhaili Sayafi'iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

<sup>71</sup> Rachmat Syafei, *Op. Cit*, h. 132.

<sup>72</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 139.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.<sup>73</sup>
- 4) Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>74</sup>

### 8. Sistem Pengupahan

Terdapat beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya upah jam-jaman, perbulan, perminggu, perhari, dan sebagainya.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang

---

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 323.

<sup>74</sup> Rahmat Syafei, *Op. Cit*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh majikan atau perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya diterima.

- e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.<sup>75</sup>

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:

- a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ketunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.
- c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak

<sup>75</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuahan Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), h. 84-87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.<sup>76</sup>

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam.

Hak-hak dan kewajiban para pekerja hendaklah jelas agar para pekerja menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan dapat dilakukan pengawasan terhadap para pekerja.

Adapun hak-hak pekerja atau *ajir*:

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b. Dia (pekerja) tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua-duanya.
- c. Dia (pekerja) harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- d. Penentuan layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi para pekerja.

---

<sup>76</sup> Djumialdji F. X., *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Para majikan harus didorong mengeluarkan shodaqahnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anaknya.
- f. Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat.
- g. Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- h. Barang-barang yang dimuat dalam pabrik harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.
- i. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja para karyawan tidak terganggu.<sup>77</sup>

### 9. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Ajaran Islam

Secara garis besar mengenai prinsip upah dalam mengajarkan agama ada tiga yaitu prinsip keadilan prinsip kelayakan dan prinsip kebijakan:

#### a. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang

---

<sup>77</sup> Afzalur Rahman, *Op. Cit*, h.361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh, yaitu:

- 1) Keadilan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, Al-Qur'an memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya.
- 2) Keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Keadilan harga kerja bertujuan untuk menegakkan keseimbangan antara kerja dengan harga yang diperoleh. Sebagaimana firman Allah SWT:

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ...

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Dari penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu besar upah yang akan diterima oleh pekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakadilan di kemudian hari.

- 3) Adil bermakna proporsional, prinsip adil secara proporsional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf [46]: 19)

Dari ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Al-Faruqi menegaskan bahwa Islam berprinsip bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Sedangkan Maududi menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang satu ketempat yang lain dan tergantung pada kondisi ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op. Cit*, h. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).<sup>79</sup>

c. Prinsip kebajikan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian antar kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (aqad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja didalam

---

<sup>79</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op. Cit*, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan pekerja dari satu daerah kedaerah yang lainnya sehingga di negara tersebut pekerja dapat mencari upah yang lebih tinggi.s

Adapun prinsip-prinsip upah diajarkan agama yang terkandung dalam beberapa hadist antara lain:<sup>80</sup>

- 1) Seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus membayar upahnya.
- 2) Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya setelah buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut.
- 3) Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar kecilnya upah bagi pekerja.
- 4) Pihak pekerja juga tidak boleh bekerja sebelum jelas upahnya.
- 5) Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjakannya harus ada kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah.
- 6) Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya atau tidak boleh ditentukan secara sepihak. Jadi kedua belah pihak harus dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Pihak pengupah berkewajiban membayar upah pekerja atau buruh, dan sebaliknya pihak pekerja berhak menuntut upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak pihak yang mengupahnya.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 345.

<sup>81</sup> Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 10. Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pekerja atau pemberi kerja) meninggal dunia akad *ijarah* tidak menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian masih ada. Sebab dalam suatu hal, satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga dengan obyek perjanjian yang tidak menyebabkan putusannya suatu perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.<sup>82</sup>

Tentang berakhirnya upah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah satu *aqid*, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad terjadi bila ada kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada sewaan tidak menyebabkan berakhirnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- c. Habis waktu, kecuali ada *uzur*.<sup>83</sup>

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

<sup>82</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, h. 148.

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju jahitan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* sudah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut mazhab Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama wafatnya salah satu pihak tidak membatalkan akad *ijarah*, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
  - 1) Terjadinya aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
  - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi '*ain*.
  - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin sesudah rusaknya barang.
  - 4) Telah terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa akad kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*. Misalnya jika masa *ijarah* tanah pertanian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa panen sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini bermaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman yang belum siap panen.<sup>84</sup>

#### D. Cicilan atau Kredit

##### 1. Pengertian Cicilan atau Kredit

Cicilan menurut KBBI, mencicil adalah membayar dan sebagainya secara sedikit demi sedikit yang sering disebut dengan meangsur. Cicilan adalah cara membayar sesuatu misalnya utang dan sebagainya secara berangsur-angsur.<sup>85</sup>

Pengertian kredit menurut bahasa Yunani adalah “*Credere*” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin disebut “*Creditum*” yang berarti “kepercayaan akan kebenaran”. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.<sup>86</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 34.

<sup>85</sup> Depaertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 1132.

<sup>86</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pegantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2010), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>87</sup>

## 2. Sejarah Munculnya Cicilan atau Kredit

Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari cara-cara yang paling mudah dalam melaksanakan tukar menukar barang. Misalnya dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak disukai masyarakat luas. Akan tetapi, untuk membawa barang-barang berharga kesana sini adalah berbahaya dan resiko dalam perjalanan terlalu besar.<sup>88</sup>

Dari perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang *Romawi* telah menggunakan uang secara sistematis. Penggunaan uang dalam bentuk yang kurang sistematis sebenarnya telah dikenal beberapa abad sebelum orang-orang *Romawi*. Dengan bertambah ramainya hubungan pedagang didaerah laut tengah, lahirlah berbagai bentuk pembiayaan misalnya yang dikenal dengan “*Sea Loans*” dimana seorang kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam menghadapi resiko. Apabila perjalanan sukses, kreditor mendapatkan 20 hingga 30%. Namun, apabila perjalanan tidak sukses misalnya kapal tenggelam, maka si kapitalis kehilangan seluruh modalnya.

<sup>87</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), h.57.

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk lain yang dikenal sebagai “*Fair Letter*” yakni semacam *promissory note* yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu (dalam *fair*) pada abad pertengahan. Artinya semacam *promissory note* yang segera akan dilunasi pada akhir pesta *fair* yang bersangkutan atau dapat juga dilunasi pada waktu diadakan *fair* yang akan datang, tergantung kepada perjanjian. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan para pedagang yang kekurangan uang *cash* untuk memperoleh barang-barang dalam *fair* tersebut, atau ditempat lain yang dijual secara kredit. Selanjutnya, penemuan benua Amerika sangat memungkinkan tumbuhnya berbagai macam usaha secara kredit, kapitalisme dan ekspansi kredit secara besar-besaran. Para *businessman* mulai mengembangkan peranan kredit salah satu sumber potensi dalam memulai dan mengembangkan suatu usahanya.<sup>89</sup>

Sedangkan perkembangan di Indonesia kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>90</sup> Sejalan dengan perkembangan dalam perniagaan dan penggunaan kredit sebagai alat pembiayaan, maka terlihat pula perkembangan yang signifikan terhadap kredit pembiayaan modal usaha kecil menengah kepada masyarakat. Dengan demikian, maka muncullah berbagai lembaga-lembaga baik lembaga swasta, pemerintah

<sup>89</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 231.

<sup>90</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta lembaga badan usaha milik negara (BUMN) yang menyediakan kredit bagi masyarakat yang memiliki usaha dengan jenis pembiayaan kredit UKM.<sup>91</sup>

### 3. Unsur-Unsur Cicilan atau Kredit

- a. Kepercayaan, adalah adanya keyakinan dari pihak pemberi kredit atas prestasi yang diberikannya kepada seseorang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa peminjaman dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
- b. Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit.
- c. Prestasi atau obyek perjanjian kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun demikian karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini kredit didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut perkreditan dalam perbankan.
- d. Resiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi maka diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Astiko, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5.

<sup>92</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, h. 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Fungsi Cicilan atau Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Lebih baik di sini diartikan bahwa fungsi tersebut dapat memberikan pengaruh bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk mencapai tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.

Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat *to serve the society* dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi kredit jika dipisahkan secara garis besar adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang.

Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang atau modal, atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkannya. Sementara itu, kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat.

<sup>93</sup> Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 38.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapatkan kredit, pengusaha (peminjam atau debitur) dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat.

- c. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi.

Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan untuk sektor-sektor yang produktif secara selektif termasuk untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara.

- d. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan.

Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada perorangan/perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi kestruktur permodalan, peningkatan ini akan berlangsung terus menerus. Secara tidak langsung hal itu terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- e. Meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar diluar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara-negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada para pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata lain, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.<sup>94</sup>

## **5. Jenis-Jenis Cicilan atau Kredit**

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

### **a. Segi kegunaan**

#### **1) Kredit Investasi**

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin dan sebagainya.

#### **2) Kredit Modal Kerja**

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan atau pembelian bahan baku produksi.

#### **3) Kredit Konsumsi**

Kredit untuk perorangan pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR/ Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB/ Kredit Kendaraan Bermotor) dan lain-lain seperti kredit tanpa agunan.

---

<sup>94</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, h. 142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan**

Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit InDelsa.

**b. Segi tujuan kredit**

- 1) Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Biasanya kredit jenis ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- 2) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai untuk seseorang dan badan usaha.<sup>95</sup>

**6. Kelebihan dan Kekurangan Cicilan atau Kredit**

**a. Kelebihan**

- 1) Menambah produktivitas modal uang.
- 2) Memajukan urusan tukar menukar.
- 3) Mempercepat peredaran barang-barang.
- 4) Dapat membuka usaha baru.

**b. Kekurangan**

- 1) Memberikan kemungkinan untuk berspekulasi.
- 2) Memberikan kesempatan para konsumen meminjam melebihi daya kemampuannya.

---

<sup>95</sup> Kasmir, *Op. Cit*, h. 81.



- 3) Menyebabkan produksi yang sangat berlebihan.
- 4) Perluasan kredit akan menimbulkan inflasi.
- 5) Mendorong masyarakat mengarah pada sifat konsumtif.<sup>96</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>96</sup> Astiko, *Op. Cit*, h. 65.

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja perspektif Fiqih Muamalah pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran upah pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibayar dengan cicilan tanpa adanya kesepakatan di awal akad dengan alasan si pemilik usaha tenda takut jikalau para pekerjanya berhenti tiba-tiba ketika orderan sewa tenda sedang banyak. Pemberlakuan sistem upah yang dicicil tersebut juga tidak diberitahukan oleh pemilik Permata Tenda karena ia mengkhawatirkan para pekerja tenda tidak menyetujui sistem tersebut.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja tanpa adanya kesepakatan di awal akad pekerjaan tidak sesuai dengan hukum Islam karena para pekerja tenda masih merasa dirugikan atas keterlambatan dalam pembayaran upah. Padahal dalam Islam upah para pekerja itu tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada kesepakatan bersama di awal akad antara pemilik usaha dengan para pekerja. Bahkan sistem pembayaran upah dengan cara dicicil tersebut juga tidak sesuai dengan hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk

membayarkan upah kepada pekerja/karyawan sebelum keringatnya kering.

## B. Saran

1. Disarankan kepada pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar menggunakan akad yang jelas dalam pengupahan para pekerja tenda di usahanya tersebut. Sehingga sistem pengupahan lebih jelas dan tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.
2. Disarankan pemilik Permata Tenda harus ada keterbukaan dengan para pekerja. Kemudian dari penentuan upah dan pembayaran upah pekerja/karyawan harus sesuai ajaran hukum Islam serta dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama, agar tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak. Sebab Islam menganjurkan pembayaran upah para pekerja sebelum keringatnya kering atau sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur, Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Terjemah Soeroyo dkk.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram.* Pustaka Imam Adz Dzahabi
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Asdi Mahasatya
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Syari'ah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Astiko. 1996. *Manajemen Perkreditan.* Yogyakarta: Andi Offset
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Mitahul Khairi.* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan.* Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah
- Bakhtiar, Amsal. 2007. *Filsafat Agama.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII Press
- Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman.* Bandung: Mizan
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- F. X. Djumialdji. 2001. *Perjanjian Kerja.* Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana
- G. Sevilla, Consuelo. 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: UI-Press



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Gustiadi, Diano. 21 September 2020. *Wawancara*. Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru: Pekerja Pada Permata Tenda
- Gustiadi, Diano. 15 Februari 2021. *Wawancara*. Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru: Pekerja Permata Tenda
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2008. *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Halim, A. Ridwan. 1985. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- Hamid, Arhamizi. 15 Februari 2021. *Wawancara*. Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru: Pemilik Permata Tenda
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Ali. 1990. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Semarang: Asy- Syifa'
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hayati, Bismi. 22 April 2021. *Wawancara*. Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana
- Hisranuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Grenta Press
- Huda, Qomural. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pegantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung, PT Rafika Aditama
- Irpan, Muhammad. 15 Februari 2021. *Wawancara*. Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru: Pekerja Permata Tenda
- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Karim, Helmi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nusa Jaya
- Kasmir. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Mitahul Khairi*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Mas'adi, Ghufuran A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Hadist Tarbiyah*. Surabaya: Al-Ikhlash
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Nazir, Habib dan Muh. Hasan. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kaki Langit
- Nurul, Huda. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pendidikan, Departemen. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Putra, Regi Mai. 15 Februari 2021. *Wawancara*. Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru: Pekerja Permata Tenda
- Praja, Juhaya S. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara
- Qal 'Ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Razak, Abdul. 15 Februari 2021. *Wawancara*. Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru: Pekerja Permata Tenda
- Ridwan. 2007. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Utara Muda
- Ridwan. 2013. *Peranan Etika Kerja Islam Terhadap Hubungan Locus of Control dengan Kinerja Karyawan*. Jurnal Trikonomika
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2007. *Etika Bisnis & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Salim, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Salim, M. Arkal. 1999. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos
- Santoso, Budi. 15 Februari 2021. *Wawancara*. Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru: Pekerja Permata Tenda
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yabasari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi. 2007. *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: Alumni
- Yazid Affandi, M. 2011. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri
- Zainal, Viethzal Rivai dkk. 2014. *Islamic Human Capital Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani



## LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Tergantung hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Sistem Cicilan terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fikih Muamalah* yang ditulis oleh :

Nama : Nisrin Afinasti  
NIM : 11722202789  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**

.....

Sekretaris  
**H. Syamsuddin Muir, Lc, MA.**

.....

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.**

.....

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag.**

.....

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6957/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NISRIN AFRINASTI
NIM	: 11722202789
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Permata Tenda Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Yang Dicicil Pada Permata Tenda Di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

**Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37020**  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



**1.04.02.01**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6957/2020 Tanggal 7 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>NISRIN AFRINASTI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11722202789</b>  |
| 3. Program Studi     | : | <b>HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>  |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>   |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA YANG DICICIL PADA PERMATA TENDA DI KULIM KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>PERMATA TENDA DI KULIM KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : **Pekanbaru**  
Pada Tanggal : **7 Desember 2020**



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/867/2021



- a. Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37020 tanggal 7 Desember 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NUSRIN AFRINASTI
2. NIM : 11722202789
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : SUKARAMAI JORONG MAKMUR DESA PADANG GELUGUR KEC. PADANG GELUGUR KAB. PASAMAN-SUMATERA BARAT
7. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA YANG DICICIL PADA PERMATA TENDA DI KULIM KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Maret 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Sekretaris

**H. MAISISCO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710514 199403 1 007

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.





## PERMATA TENDA

### KELURAHAN KULIM KECAMATAN TENAYAN RAYA

Alamat: Jl. Tarikat, RT 02/ RW 02, Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Arhamizi Hamid selaku pemilik Permata Tenda

menerangkan bahwa:

Nama : Nisrin Afrinasti

Nomor Induk Mahasiswa : 11722202789

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Keterangan : Nama diatas benar-benar telah menyelesaikan penelitian di Permata Tenda mengenai "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Yang Dicicil Pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" pada tanggal 15 Februari 2021.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulim, 4 April 2021  
Pemilik Permata Tenda

**PERMATA TENDA**  
Arhamizi Hamid



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : NISRIN AFRINASTI  
**NIM** : 11722202789  
**JURUSAN** : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
**JUDUL** : SISTEM CICILAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEKERJA  
 PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

**Pembimbing:** Drs. H. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**NISRIN AFRINASTI** dilahirkan di Desa Sukaramai Kabupaten Pasaman Timur pada 21 April 1999 yang merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara dari pasangan Bapak Khairunas dan Ibu Sarteti. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di MIS Sukaramai Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur.

Setelah menamatkan studi di MIS Sukaramai tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Padang Gelugur dari tahun 2011-2014 yang terletak di desa Pegang Baru. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Panti Kabupaten Pasaman Timur dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta serta melakukan Kuliah Keja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Pekerja Yang Dicicil Pada Permata Tenda Di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.”** di bawah bimbingan Drs. H. Zainal Arifin. MA.